

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Finrely, C & Ardiansyah. (2022). Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Melalui Program Pengungkapan Sukarela Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela. *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2*. Jakarta.
- Hadi, S. S. & Bindura, R. T. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng. *Jurnal Moneter Vol. 5 No. 1*. Jakarta.
- Haryadi, D. (2022). Gray Area dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. *MABIS Vol. 13 No. 1*. Pontianak.
- Junaedi, B. (2011). *Evaluasi Penggalan Potensi Pajak Berbasis Profil dan SPT yang Dilaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Cakung Satu)*. (Tesis Magister, Universitas Indonesia).
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20345035&lokasi=lokal#>
- Mamesah, J. J. & Kristanto A. B. (2021). Efektivitas *Tax Amnesty* Di Indonesia: Studi Meta-Analisis. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Vol. 10 No. 5*. Bali.
- Mimi & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti Vol. 9 No.1*. Jakarta.
- Nurkholis, N., Dularif, M., & Rustiarini, N. W. (2020). *Tax Evasion And Service-Trust Paradigm: A Meta-Analysis*. Cogent Business & Management. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1827699>
- Ningtyas, A. S. C. & Aisyaturrahmi. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (*Tax Amnesty* Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) Vol. 10 No.1*. Aceh Utara.
- Prasetyana, E. & Febriani, E. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Selama Masa Pandemi Covid-19. *Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume. 19 Issue 2*. Samarinda.

- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)* Vol. 7, No. 1. Jakarta.
- Putra, P. D., Zainal A., Ambarita, C. F., Pratiwi, E. (2020). Tingkat Kesadaran Kepatuhan Pajak: Studi terhadap Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol.9, No.2. Medan.
- Siregar, L. H. (2017). Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Dari Sektor Fiskal. *HIJRI-Jurnal Manajemen Pendidikan dan Keislaman* Vol. 6. No. 1. Medan.

Internet

- DDTC News. (2022). *Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak ini*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/mau-tahu-hasil-pelaksanaan-pps-2022-simak-data-dari-ditjen-pajak-ini-40264>
- DDTC News. (2022). *PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/pps-jadi-booster-penerimaan-pajak-setoran-pph-final-melonjak-40137>
- DDTC News. (2022). *Setelah PPS Rampung, DJP Bakal Lebih Leluasa Kulik Data Wajib Pajak*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/setelah-pps-rampung-djp-bakal-lebih-leluasa-kulik-data-wajib-pajak-37043>
- Handoko, R. S. (2021). DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dampak Besar Pandemi di Sektor Ekonomi*. E-Parlemen DPRD DIY. <https://www.dprd-diy.go.id/dampak-besar-pandemi-di-sektor-ekonomi/>
- Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. (2022). *Komwasjak Lakukan Edukasi Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak*. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/komwasjak-lakukan-edukasi-program-pengungkapan-sukarela-bagi-wajib-pajak>

Peraturan Perundang-undangan

- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Indonesia. (2016). *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2021). *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan.